

Pengembangan Potensi Pertanian dalam Program Penanganan Akses Reforma Agraria (Para) di Kabupaten Blora

Development of Agricultural Potential in the Agrarian Reform Access Handling Program (Para) in Blora Regency

Ardhi Arnanto*, Theresia Suprianti, Abdul Haris Farid

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jl. Tata Bumi No.5, Sleman, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: ardhi.arnanto@stpn.ac.id

Submitted: October 11, 2025 | Accepted: November 4, 2025 | Published: November 8, 2025

Abstract: Dryland farming dominates Blora Regency, with a high level of critical land, resulting in low productivity and low farmer incomes. Most farmers have small plots of land and face limited subsidized fertilizer, minimal irrigation, and fluctuating crop prices. This study aims to examine the Agrarian Reform Access Handling Program (PARA) in improving farmer welfare in the region. The method used was qualitative research, located in Sumurboto, Wantilung, and Tempuran Villages. Primary data were collected through interviews with 300 PTSL participants from 2016–2020. The results indicate that the majority of farmers have low education and earn less than IDR 1,500,000 per month, far below the Blora Regency minimum wage in 2024. Although the PTSL program has provided legal land ownership, most recipients have not utilized their certificates to gain access to capital from financial institutions. Training programs such as manure production, agricultural product processing, and strengthening farmer groups have shown positive results but have not significantly increased income. To achieve sustainable farmer independence and welfare in Blora Regency, we need to further evaluate the strategy and implementation of the PARA Program.

Keywords: Access to Agrarian Reform, Agricultural Potential, PTSL, Blora Regency

Abstrak: Pertanian lahan kering mendominasi wilayah Kabupaten Blora dengan tingkat lahan kritis yang tinggi, menyebabkan produktivitas rendah dan pendapatan petani kecil. Sebagian besar petani memiliki lahan sempit, menghadapi keterbatasan pupuk subsidi, minimnya irigasi, serta fluktuasi harga hasil panen. Penelitian ini bertujuan menelaah Program Penanganan Akses Reforma Agraria (PARA) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan lokasi di Desa Sumurboto, Wantilung, dan Tempuran. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terhadap 300 peserta PTSL tahun 2016–2020. Hasil menunjukkan mayoritas petani berpendidikan rendah dan berpenghasilan kurang dari Rp1.500.000 per bulan, jauh di bawah UMR Kabupaten Blora tahun 2024. Meskipun program PTSL telah memberikan legalitas kepemilikan tanah, sebagian besar penerima belum memanfaatkan sertifikatnya untuk memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan. Program pelatihan seperti pembuatan pupuk kandang, pengolahan hasil pertanian, dan penguatan kelompok tani menunjukkan hasil positif namun belum signifikan meningkatkan pendapatan. Kesimpulannya, diperlukan evaluasi lanjutan terhadap strategi dan pelaksanaan Program PARA untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan di Kabupaten Blora.

Kata Kunci: Akses Reforma Agraria, Potensi Pertanian, PTSL, Kabupaten Blora



Jurnal Pertanahan is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Pendahuluan

Kabupaten Blora adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki komitmen untuk mengembangkan sektor pertanian dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Hal ini tertuliskan sebagai visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Blora dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) (Rahayu dkk., 2013). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah. Kinerja sektor pertanian dalam pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Blora menunjukkan rata-rata 53% dengan sumbangan laju pertumbuhan sebesar 4,26% (Rahayu dkk., 2013).

Pemerintah Daerah Kabupaten Blora seharusnya memberikan perhatian bagi sektor pertanian yang punya potensi cukup besar. Usaha peningkatan peran sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi fisik, sosial, maupun ekonomi. Secara fisik, wilayah Kabupaten Blora sangat dominan dengan pertanian lahan kering dengan kondisi sebagian lahan kritis yang cukup tinggi (Anggi Ramayanti dkk., 2015). Secara sosial dan ekonomi, pemilikan dan penguasaan tanah pertanian oleh petani masih relatif kecil sehingga mengakibatkan pendapatan petani dari sektor pertanian masih sangat kecil. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab angka kemiskinan petani yang cukup tinggi di Kabupaten Blora (Ariga Tri Yanutya, 2013). Permasalahan pupuk yang merupakan faktor produksi yang penting dalam pengelolaan pertanian juga masih terjadi, baik dari sisi ketersediaan pupuk maupun pola penggunaan yang tidak efektif. Upaya pemerintah dalam pengaturan pupuk dengan menggunakan kartu tani juga masih belum berjalan baik (Budi dkk., 2021).

Komoditas tanaman pangan masih sangat potensial untuk dikembangkan, di beberapa daerah di wilayah Kabupaten Blora, selain komoditas padi, mayoritas diusahakan untuk komoditas palawija, seperti jagung, kacang hijau, ubi jalar, dan ubi kayu (Isyanto dkk., 2019). Berbagai potensi komoditas unggulan ini tidak akan dapat berkembang maksimal jika tidak ada pembinaan terhadap petani. Program-program pembinaan terhadap petani yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan harus dirancang lintas sektoral karena sektor pertanian tidak hanya melibatkan instansi yang mengurusi pertanian saja, tetapi juga berbagai instansi yang terkait, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.

Kantor Pertanahan selaku instansi yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pendaftaran tanah juga menjadi salah satu instansi yang berperan dalam pengembangan potensi pertanian di Kabupaten Blora. Tanah sebagai salah satu faktor produksi di dalam usaha tani menjadi faktor penentu peningkatan pendapatan dari sektor pertanian. Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Blora mengadakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk tanah pertanian sebagai bagian dalam menunjang peningkatan akses permodalan bagi petani (Pranoto dkk., 2023). Pendaftaran tanah pertanian bagi petani-petani produktif merupakan bagian dari program percepatan reforma agraria yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Akselerasi Reforma Agraria.

Waryanta (2018) berpendapat bahwa program reforma agraria itu mencakup program penataan aset dan penataan akses. Penataan aset dilakukan dengan memberikan atau melakukan legalisasi tanah kepada petani untuk penguatan hak atas tanah yang dikuasai masyarakat. Penataan akses dilakukan dengan memberdayakan tanah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup petani dengan penyediaan akses infrastruktur pendukung, pembiayaan, pengolahan, produksi, pemasaran sampai dengan distribusinya. Dukungan program reforma agraria kepada petani bertujuan jangka panjang dalam menjaga kedaulatan pangan. Program penataan aset dalam reforma agraria yang dilaksanakan Kantor Pertanahan antara lain legalisasi aset melalui PTSL, redistribusi tanah, dan legalisasi aset lintas sektoral. Selain itu, program penataan akses juga dijalankan di Kantor Pertanahan dalam berbagai bentuk yang melibatkan lintas sektor (Fadjar dkk., 2017).

Kajian tentang reforma agraria telah banyak dilakukan, baik disektor pertanian maupun UMKM. Beberapa penelitian mengkaji tentang peningkatan pendapatan petani pasca program reforma agraria dan berbagai bentuk implementasi program reforma agraria. Kajian pada tulisan ini mengambil sudut pandang tentang potensi dari masyarakat yang telah mendapatkan program penanganan akses reforma agraria di Kabupaten Blora. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Blora menjadi sangat menarik untuk dilakukan penelitian karena karakteristik fisik lahan dan tingginya kemiskinan petani. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu dkk., 2013) menjelaskan bahwa sektor pertanian yang merupakan sektor yang menjadi penyumbang dominan PRDB Kabupaten Blora pertumbuhannya stagnan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang terjadi, yaitu keterbatasan sarana irigasi, degradasi tanah, dan minimnya pemanfaatan teknologi oleh petani. Permasalahan tanah marginal yang ada di Kabupaten Blora juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Siswanto dkk., 2024), sebagian besar wilayah yang masuk dalam penelitian menunjukkan nilai kesuburan sedang hingga rendah dengan kandungan bahan organik dan fosfor rendah.

Penduduk Kabupaten Blora 75% adalah petani, sehingga isu-isu kemiskinan di Kabupaten Blora akan sangat terkait dengan keluarga petani. Persentase penduduk miskin Blora adalah 11,42 persen, meskipun angka ini menunjukkan penurunan 0,07 persen dibandingkan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 adalah 99,14 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik, 2024). Berbagai permasalahan petani di Kabupaten Blora menjadi sangat menarik untuk dikaji dalam mendukung optimalisasi penerima program penanganan akses reforma agraria. Program akses reforma agraria diharapkan menjadi salah satu alternatif dalam memperkuat petani di Kabupaten Blora yang mempunyai berbagai keterbatasan, baik dari sisi kemampuan fisik tanah maupun sempitnya kepemilikan tanah pertanian.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Sumurboto Kecamatan Jepon, Desa Wantilung Kecamatan Ngawen, dan Desa Tempuran

Kecamatan Blora Kabupaten Blora. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang potensi masyarakat penerima Program Penanganan Akses Reforma Agraria (PARA) berdasarkan pemetaan sosial yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan “*sosial situation*” (Sugiyono, 2022).

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dengan narasumber. Adapun narasumber yang dipilih adalah masyarakat penerima program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada tahun 2016 hingga 2020 sebanyak 300 narasumber yang dibagi pada masing-masing desa 100 narasumber. Instrumen yang digunakan dalam wawancara telah diatur dalam Petunjuk Teknis Program Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2023.

Data sekunder dibutuhkan sebagai bagian kontrol data hasil wawancara, yaitu dengan melakukan proses verifikasi dengan data dari Desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora yang telah melakukan program ditahun sebelumnya. Selain itu, data sekunder juga diambil dari beberapa referensi tulisan ilmiah yang membahas tentang akses reforma agraria di Kabupaten Blora. Hasil wawancara yang telah divalidasi dianalisis dengan menggunakan tabulasi yang disajikan secara deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Permasalahan dan Potensi Pertanian

Program reforma agraria yang menjadi salah satu program di Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri dari dua program utama, yaitu penataan aset dan penataan akses. Program ini bertujuan untuk menciptakan dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Penataan aset adalah program penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, sedangkan penataan akses lebih pada program untuk memberikan akses bagi masyarakat penerima penataan aset agar lebih optimal dalam memanfaatkan asetnya. Program ini sering dikenal dengan pemberdayaan tanah masyarakat agar tanah obyek reforma agraria menjadi lebih produktif. Beberapa kajian terhadap program ini mampu meningkatkan kesejahteraan bagi penerima program dengan mengoptimalkan aset-aset penghidupan, terutama aset finansial (Fajri dkk., 2024).

Keberhasilan implementasi program sangat dipengaruhi pemahaman pengampu kebijakan dari subyek penerima program sehingga pemetaan sosial dari subyek penerima program menjadi sangat penting. Pemetaan sosial menjadi landasan untuk mengidentifikasi dan memahami dinamika sosial, ekonomi, dan budaya terkait dengan pengelolaan tanah. Kajian ini dilakukan melalui analisis mendalam dan melibatkan partisipasi masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat dasar dalam pengambilan kebijakan bagi stakeholder terkait untuk meningkatkan strategi dan implementasi program pemberdayaan tanah masyarakat yang lebih efektif (Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, 2023).

Kajian pemetaan sosial dilakukan di 3 desa yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan sebagai desa penerima program Penanganan Akses Reforma Agraria (PARA) berdasarkan

Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Nomor: 1177/SK-33.16.NT.01.03/IV/2023 tanggal 03 Mei 2024. Lokasi tersebut yaitu Desa Sumurboto Kecamatan Jepon, Desa Tempuran Kecamatan Blora, dan Desa Wantilgung Kecamatan Ngawen (Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, 2022).

Target rumah tangga yang akan didampingi dalam kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria Kabupaten Blora Tahun 2023 adalah sebanyak 300 KK dengan 100 KK setiap lokasi desa. Target rumah tangga tersebut diperoleh dari peserta kegiatan pensertifikatan tanah melalui program PTSL tahun 2016-2020 yang telah dilaksanakan pada tiga desa lokasi kegiatan. Harapannya penerima program PTSL di ketiga desa ini dapat memanfaatkan berbagai akses dari pensertifikatan tanah yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi petani, sangat ditentukan oleh kombinasi faktor internal (potensi lokal dan partisipasi), dukungan kelembagaan (pemerintah dan kelompok), serta peningkatan kapasitas teknis dan manajerial (Siswari, 2025).

Faktor internal yang mendorong kapasitas masyarakat petani dalam meningkatkan potensi lokal dan partisipasi adalah tingkat pendidikan petani. Struktur pendidikan di ketiga desa tersebut menunjukkan mayoritas merupakan tamatan sekolah dasa dan sekolah menengah pertama yang dapat dilihat pada tabel 1. Tingkat pendidikan akan sangat menentukan bagaimana strategi untuk membangun kapasitas internal petani yang menjadi penerima manfaat program.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Narasumber Akses Reforma Agraria

Tingkat Pendidikan	Desa Sumurboto	Desa Wantilgung	Desa Tempuran
Tidak Tamat SD	4	20	3
SD	24	55	75
SLTP/SMP	46	10	10
SLTA/SMA	25	10	12
Strata I	1	5	-
Total Keluarga Petani	100	100	100

Sumber: Program Pemetaan Sosial Penanganan Akses Reforma Agraria, 2023

Tingkat pendidikan akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman dan semangat masyarakat dalam mengembangkan usaha pertanian untuk mendukung keberlanjutan program. Keberhasilan program sangat bergantung pada peran aktif petani dalam mengikuti pelatihan dan pendampingan teknis yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Kemampuan berwirausaha dalam bidang pertanian juga menjadi hal penting dalam keberhasilan program pemberdayaan petani. Data struktur pendidikan di wilayah penelitian menjadi salah satu tantangan dalam memberikan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan wirausaha petani.

Potret pendapatan penerima manfaat pada program Penanganan Akses Reforma Agraria dapat yang telah dilakukan di Desa Sumurboto, Desa Wantilgung, dan Desa Tempuran

majoritas bermata pencaharian sebagai petani. Mayoritas rata-rata penghasilan dari penerima manfaat program PARA kurang dari Rp. 1.500.000, lihat tabel 2. Penghasilan tersebut didapatkan dari hasil usaha pertanian ditambah dengan usaha sampingan lainnya (Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, 2022). Sebagian besar penerima program PARA sudah tidak mempunyai tanggungan didalam keluarga sehingga pendapatan tersebut lebih pada untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Anggota keluarga yang lain banyak yang sudah bekerja di tempat lain sehingga kebutuhannya sudah tidak menjadi tanggungan bagi keluarganya. Besaran pendapatan ini masih jauh dari besaran UMR Kabupaten Blora tahun 2024 yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yaitu sebesar Rp. 2.101.813 (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Tabel 2. Pendapatan Penerima Program PARA

No	Desa	Sumber Pendapatan Utama	Rata-Rata Pendapatan
1	Desa Sumurboto	Pertanian	kurang dari Rp. 1.500.000
2	Desa Wantilgung	Pertanian	kurang dari Rp. 1.500.000
3	Desa Tempuran	Pertanian	kurang dari Rp. 1.500.000

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, 2023

Peningkatan usaha pertanian sangat dipengaruhi faktor modal yang dimiliki oleh petani untuk mengembangkan usaha pertaniannya agar menghasilkan secara optimal. Keterbatasan pemilikan tanah yang digunakan untuk menggarap usaha pertanian harus diatasi dengan intensifikasi, namun modal menjadi kendala dalam pengembangan usaha. Legalisasi aset pada program PTSL diharapkan bisa menjadi stimulus bagi petani untuk mengakses permodalan di bank. Data-data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blora menunjukkan penerima program legalisasi aset tanah pertanian melalui PTSL belum memanfaatkan sertifikat untuk mengakses permodalan dari perbankan. Mayoritas penerima program PTSL hanya menyimpan sertifikatnya dirumah, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Pemanfaatan Sertifikat Tanah untuk Akses Permodalan

No	Desa	Akses Permodalan
1	Desa Sumurboto	Mayoritas sertifikat tanah hanya disimpan
2	Desa Wantilgung	Mayoritas sertifikat tanah hanya disimpan
3	Desa Tempuran	Mayoritas sertifikat tanah hanya disimpan

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, 2023

Pemerintah Daerah Kabupaten Blora sebenarnya telah mengupayakan dukungan politik untuk memperkuat dan mempermudah akses petani terhadap permodalan. Hal ini ditunjukkan dengan keluarnya Perda Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah upaya mempermudah petani dalam mengakses permodalan dengan bunga yang rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi petani yang menerima program PTSL yang menurut data di tahun 2023 mayoritas hanya menyimpan sertifikat tanah yang dimiliki. Harapan program PTSL dengan memberikan aset kepada petani dapat menguatkan

permodalan untuk mengembangkan usaha tani yang dijalankan. Pemerintah Daerah juga telah menjadi fasilitator bagi masyarakat petani dengan bank pemberi pinjaman, baik dari bank-bank BUMN maupun BPR.

Permasalahan lain yang terjadi dalam pengembangan usaha pertanian adalah hama/penyakit, pengairan/irigasi, dan harga jual hasil panen yang tidak menentukan. Hal ini membuat petani merugi dalam beberapa masa tanam terakhir. Kendala lain yaitu terkait pemupukan yang masih kurang dikarenakan terbatasnya kuota subsidi pupuk yang dimiliki para pemilik kartu tani. Permasalahan keterbatasan pupuk subsidi jika harus diatasi dengan pupuk non subsidi juga sangat memberatkan petani karena harganya yang mahal. Akibat dari keterbatasan pupuk subsidi adalah hasil panen yang tidak maksimal sehingga menurunkan pendapatan petani.

Keterbatasan sumberdaya lahan yang merupakan wilayah kering sehingga saat ini yang dikembangkan di wilayah Kabupaten Blora adalah pertanian lahan kering dan sawah tada hujan. Komoditas yang menjadi andalan bagi pertanian di sana adalah padi dan jagung. Pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan perlu merumuskan program agar saat terjadinya panen raya harga dari komoditas padi dan jagung tidak jatuh. Beberapa masukan untuk solusi ini juga pernah dirumuskan dalam kajian, yaitu dengan diversifikasi tanaman sehingga tidak hanya berfokus pada padi dan jagung (Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, 2023).

Implementasi Program Penanganan Akses Reforma Agraria

Kantor Pertanahan kabupaten Blora dalam rangka percepatan program Reforma Agraria sesuai Perpres 62 tahun 2003 telah melakukan program legalisasi aset baik melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang dimulai sejak tahun 2017 dan juga telah bekerja sama dengan instansi lain yaitu Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan untuk persertipikatan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Tujuan dari persertipikatan tanah LP2B yang pernah dilakukan agar petani dapat mempertahankan tanah pertanian miliknya sehingga akan tercukupi kebutuhan swasembada pangan.

Program legalisasi aset Kantor Pertanahan kabupaten Blora yang dilakukan diperkuat dengan membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 140.1/1708/2019 sebagai ketua adalah Bupati Blora dan Ketua Pelaksana Harian dijabat oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Tugas dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) ini diantaranya adalah melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah, melaksanakan penataan akses, melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan asset dan penataan asset di Kabupaten Blora dan juga memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria. Program PARA yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan penataan aset dilakukan di 3 lokasi, yaitu Desa Sumurboto, Desa Wantilgung, dan Desa Tempuran.

Implementasi program yang dirancang dalam rangka penanganan akses reforma agraria untuk memperkuat petani di ketiga desa tersebut antara lain:

1. Pelatihan pembuatan pupuk kandang dari kotoran ternak sapi sebagai pupuk alternatif bagi petani agar tidak terlalu tergantung dengan pupuk subsidi. Hal ini disebabkan karena jumlah pupuk subsidi yang diberikan untuk pertanian tanaman pangan jumlahnya terbatas, sedangkan harga pupuk non subsidi sangat mahal.
 2. Tanaman dengan komoditas padi dan jagung yang banyak ditanam di wilayah Kabupaten Blora banyak terserang hama. Program edukasi terkait dengan bagaimana cara untuk mengatasi hama yang menyerang khususnya pada tanaman pangan dirancang agar petani mampu melakukan pencegahan serangan hama sehingga jumlah gagal panen dapat dikurangi dengan signifikan.
 3. Program menciptakan pasar-pasar alternatif dilakukan untuk mencegah harga jual yang rendah pada saat panen raya.
 4. Pelatihan dalam rangka peningkatan ketrampilan bertani yang baik dan pelatihan dalam pengolahan hasil pertanian yang dapat memiliki harga jual yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk memberikan ketrampilan kepada petani agar lebih efisien dalam pengelolaan tanah pertaniannya sehingga akan mendapatkan hasil panen yang lebih baik. Selain itu, pelatihan untuk pengolahan hasil pertanian seperti tanaman jagung agar petani mampu mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi dari produk olahan tersebut.
- Dengan fasilitasi pembentukan kelembagaan/ kelompok Masyarakat petani maka jika ada bantuan yang diberikan untuk Masyarakat petani baik dari instansi atau dinas lain akan lebih memberikan kemudahan dalam pendistribusianya.
5. Fasilitasi pembentukan kelembagaan/ kelompok masyarakat petani yang membantu dalam penyaluran bantuan yang diberikan untuk Masyarakat petani baik dari instansi atau dinas lain akan lebih memberikan kemudahan dalam pendistribusianya.

Data hasil pemetaan pada penerima program yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terkait program implementasi penanganan akses reforma agraria yang dilakukan di 3 desa penerima manfaat akses Reforma Agraria pada tahun 2023, yaitu Desa Sumurboto, Desa Wantilung, dan Desa Tempuran ditemukan beberapa kendala petani yang dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Kendala Implementasi PARA di Tanah Pertanian

Nama Desa	Kendala	Solusi
Desa Sumurboto,	Pupuk Kimia Subsidi yang sulit dan dibatasi saat waktunya	Pelatihan pembuatan pupuk kandang atau pupuk organik padat atau pupuk organik cair
Desa Watilung,	pemupukan, sedangkan pupuk kimia nonsubsidi harga mahal	
Desa Tempuran	Limbah pertanian (bonggol jagung) yang belum dimanfaatkan	Pelatihan/sosialisasi pemanfaatan limbah hasil pertanian untuk dijadikan pakan fermentasi ternak

Harga komoditas pertanian (padi dan jagung) anjlok ketika panen raya, serta hasil panen jagung belum diolah menjadi produk-produk dengan nilai jual lebih tinggi ketika panen	Pelatihan mengolah jagung menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi
Komoditas tanaman yang masih terfokus pada tanaman pangan (padi dan jagung) kurang adanya variasi komoditas tanaman seperti tanaman hortikultura	Sosialisasi terkait potensi dan proses diversifikasi komoditas tanaman pertanian yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Serta bantuan bibit tanaman hortikultura yang memiliki peluang menjanjikan untuk dikembangkan
Kurangnya irigasi (kebutuhan air) saat musim kemarau	Bantuan pembuatan sumur guna memenuhi kebutuhan air petani

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, 2023

Langkah awal di tahun 2023 yang dilakukan dalam program Penanganan Akses Reforma Agraria ini adalah penataan kelembagaan petani. Hal ini dimaksudkan agar distribusi bantuan bagi petani dapat berjalan dengan efektif. Kegiatan penataan dilakukan oleh lintas sektoral, yaitu Kantor Pertanahan dan Dinas-Dinas terkait di Kabupaten Blora dengan melakukan inventarisasi dan penataan kelembagaan kelompok tani, hasil penataan dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Penataan Kelembagaan Kelompok Tani di Wilayah Penelitian

Desa	Nama Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	Jumlah Anggota (Orang)
Desa Sumurboto	Kelompok tani Karya	84
	Kelompok tani Ngudi Makmur	98
	Kelompok tani Ngudi Mulyo	89
Desa Wantilung	Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) "Agung" (Menggabungkan kelompok) (Sudah berbadan hukum)	3
	Kelompok tani Agung I	45
	Kelompok tani Agung II	52
	Kelompok tani Agung III	91
Desa Tempuran	Kelompok tani "Ngudi Rahayu" (Sudah berbadan (Menggabungkan kelompok) hukum)	3
	Kelompok tani Ngudi Rahayu I	60
	Kelompok tani Ngudi Rahayu II	108
	Kelompok tani Ngudi Rahayu III	52
Kelompok tani "Unggul" (Sudah berbadan hukum)		73

Sumber: Data Pemetaan Sosial Penanganan Akses Reforma Agraria, 2024

Program penataan kelembagaan diikuti dengan program pelatihan pembuatan pupuk kandang yang bertujuan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia.

Permasalahan distribusi dan ketersediaan pupuk kimia menjadi salah satu faktor penghambat dalam peningkatan produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Blora. Program pelatihan ini dilakukan pada tahun 2023. Program ini menunjukkan hasil yang cukup baik pada tahun 2024, mayoritas petani-petani binaan telah membuat fasilitas pengolahan pupuk kandang di setiap rumah, lihat gambar 1. Pupuk kandang yang selama ini langsung digunakan tanpa diolah membuat produktivitas menjadi tidak meningkat.



Gambar 1. Fasilitas Pengolahan Pupuk Kandang
Sumber: Data Lapangan, 2024

Data pemetaan sosial dalam program Penanganan Akses Reforma Agraria yang telah dilaksanakan dapat menyajikan gambaran secara umum bahwa program-program bantuan bagi petani belum dapat mencapai tujuan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan petani. Hal ini yang menjadi salah satu evaluasi program-program yang telah dilakukan agar dapat membantu mewujudkan para petani yang mendiri dan sejahtera (Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, 2022).

Kesimpulan

Permasalahan umum petani di Kabupaten Blora, termasuk para petani penerima program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kondisi tanah kristis yang tinggi, keterbatasan sarana irigasi, dan degradasi tanah. Permasalahan lain yang menonjol adalah keterbatasan ketersediaan dan kuota pupuk subsidi, serta anjloknya harga jual komoditas (padi dan jagung) saat panen raya. Sumberdaya manusia penerima program juga menjadi tantangan tersendiri karena memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah (tamat SD atau SMP).

Program legalisasi aset melalui PTSL diharapkan dapat menjadi stimulus bagi petani untuk mengakses permodalan di bank, namun data menunjukkan bahwa mayoritas penerima

program PTSL pada tahun 2023 belum memanfaatkan sertifikat tanah untuk mengakses permodalan perbankan. Hal ini terjadi meskipun Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Perda untuk mempermudah petani mengakses permodalan dengan bunga rendah.

Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Blora menerapkan beberapa strategi penyelesaian permasalahan tersebut, melalui program penanaman kelembagaan, pelatihan pembuatan pupuk kandang, program edukasi penanganan hama, pelatihan pengolahan hasil pertanian, penciptaan pasar alternatif bagi produk pertanian, bantuan diversifikasi komoditas pertanian, dan bantuan sumur bor.

Data pemetaan sosial menjelaskan bahwa program-program bantuan yang telah dilaksanakan dalam kerangka PARA belum dapat mencapai tujuan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan dan mewujudkan petani yang mandiri dan sejahtera. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan peningkatan strategi program, terutama dalam mendorong pemanfaatan aset yang telah dilegalisasi untuk akses permodalan dan mengatasi kendala produksi pertanian yang bersifat struktural.

Daftar Pustaka

- Anggi Ramayanti, L., Darmo Yuwono, B., & Awaluddin, M. (2015). Pemetaan Tingkat Lahan Kritis dengan Menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi (Studi Kasus: Kabupaten Blora). *Jurnal Geodesi Undip*, 4(2), 2337–2845.
- Ariga Tri Yanutya, P. (2013). Analisis Pendapatan Petani Tebu di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 286–296. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Blora dalam Angka 2024* (1 ed., Vol. 41). Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora.
- Budi, S., Sugihardjo, S., & Permatasari, P. (2021). Analisis Efektivitas Program Kartu Tani di Desa Cabak, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 14(3), 299. <https://doi.org/10.19184/jsep.v14i3.26923>
- Fadjar, M., Juliani, H., & Susila Adiyanta, F. C. (2017). Kebijakan Reforma Agraria Untuk Kemandirian Pangan Nasional (Studi Implementasi Kebijakan Publik Kantor ATR/BPN Kab. Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–17.
- Fajri, I., Pujiriyani, D. W., & Christine, R. V. (2024). Reforma Agraria Perkotaan: Dampak Penanganan Akses Terhadap Aset Penghidupan Masyarakat Kampung Kenteng, Kota Surakarta, Jawa Tengah. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2), 229–244. <https://doi.org/10.15575/jt.v7i2.32458>
- Isyanto, A. Y., Sudrajat, Yusuf, M. N., Novianty, A., Andrie, B. M., Priantika, W., Harli, N., & Aziz, S. (2019). Komoditas Potensial Tanaman Palawija di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 5(2), 368–378.

- Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. (2022a). *Laporan Penetapan Lokasi Penanganan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.* <https://1drv.ms/b/s!Ap10s2qcbDzzga5Dr5x2roMr8KxXCQ?e=57dgfx>
- Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. (2022b). *Laporan Penyuluhan Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.* <https://1drv.ms/b/s!Ap10s2qcbDzzga5EvhpYSvWXJssXXg?e=dPjmeb>
- Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. (2023). *Laporan Pemetaan Sosial Penanganan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.* <https://1drv.ms/b/s!Ap10s2qcbDzzga1dzYoOlbMqje1vyA?e=XWvTnS>
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2023, November 30). *UMK Jateng 2024 Diumumkan, Kota Semarang Tertinggi.* <https://jatengprov.go.id/publik/umk-jateng-2024-diumumkan-kota-semarang-tertinggi/>
- Pranoto, M. M., Pranoto, E., & Soleh, M. (2023). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Brabowon Kecamatan Sambong Kabupaten Blora. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(1), 222–235.
- Rahayu, W., Pengajar, S., Sosial, J., Pertanian, E., Agrobisnis, /, & Pertanian, F. (2013). Kinerja dan Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi Kabupaten Blora. *SEPA*, 9(2), 201–208.
- Siswanto, D., Widjajani, B. W., & Siswanto. (2024). Analisis Status Dan Kelas Kemampuan Kesuburan Tanah Pada Beberapa Lahan Tebi di Kecamatan Japah Kabupaten Blora. *Jurnal Agrotropika*, 1(23), 77–88.
- Siswari. (2025). Analisis Sosial Ekonomi Pemberian Bibit Kambing Betina terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Sembongin Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Dalam *Bookchapter Ekonomi Universitas Negeri Semarang* (1 ed., hlm. 127–151). Universitas Negeri Semarang. <https://doi.org/10.15294/ie.v3i1.407>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2 ed., Vol. 4). Alfabeta.
- Waryanta, Mr. (2018). Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), 179–193. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.69>